

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perikanan merupakan bagian dari sektor pertanian yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sektor perikanan tidak hanya menyediakan kebutuhan pangan berupa protein hewani, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakatnya yang berkontribusi terhadap total PDB di Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar.

Sumber Daya Ikan (SDI) di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, dan rumput laut (KKP, 2024). Potensi perikanan laut dengan nilai ekonomis yang tinggi apabila diekspor akan menjadi salah satu penyumbang devisa bagi perekonomian Indonesia, yang berdampak pada penyediaan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku ekonomi di bidang perikanan (Alwasifah & Rahayu, 2022).

Selama periode 2019 sampai 2022, sektor pertanian secara luas termasuk kehutanan dan perikanan menduduki peringkat kedua setelah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 13,02% terhadap PDB Indonesia. Subsektor perkebunan merupakan subsektor yang memiliki kontribusi tertinggi

terhadap PDB Indonesia pada tahun 2022 sebesar 3,76%, disusul oleh subsektor perikanan dengan kontribusi sebesar 2,58%, dan subsektor tanaman pangan dengan kontribusi sebesar 2,32% (Sabarella *et al.*, 2023).

Penelitian terkait Produk Domestik Bruto tentu sudah tidak asing lagi bagi para peneliti. PDB dalam perhitungannya memiliki tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Penelitian dengan menggunakan pengembangan daripada *grand theory* produksi telah diteliti oleh Wicaksono *et al.* (2021) lebih tertarik melihat dari sisi variabel bebas jumlah transportasi darat, infrastruktur, dan jumlah penduduk, Dianissa (2018) meneliti pengaruh variabel bebas jumlah nelayan, jumlah kapal, jumlah trip penangkapan ikan di laut, jumlah unit penangkapan ikan di laut, dan jumlah tangkapan ikan di laut, Mulyasari (2018) telah mengkaji peran variabel bebas indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja, dan Agustiani & Syechalad (2016) telah meneliti pengaruh produksi perikanan budidaya, jumlah rumah tangga nelayan, jumlah lahan budidaya, dan produksi perikanan tangkap.

Pengkajian terhadap Produk Domestik Bruto dengan pendekatan pengeluaran juga telah banyak dipublikasikan seperti Maranatha (2023) dan Rizky *et al.* (2022) dengan menggunakan variabel bebas investasi asing dan investasi dalam negeri, Kristina (2019) dan Nofinawati *et al.* (2017) telah meneliti pengaruh variabel bebas ekspor dan impor, dan Mauliansyah & Mard (2017) memberi fokus pada variabel bebas investasi dan belanja pemerintah.

Pengembangan *grand theory* pendekatan pengeluaran terhadap PDB telah ditulis oleh Nailufar *et al.* (2023) dengan menggunakan variabel bebas pengeluaran

pemerintah, penanaman modal dalam negeri, dan pengeluaran pemerintah, Tajudin (2023) juga telah melihat dari sisi variabel bebas belanja daerah, PMA, dan PMDN, Andriani *et al.* (2021) telah meneliti pengaruh variabel bebas PMA, ekspor, ULN, dan tingkat inflasi, Lubis & Riva'i (2016) menggunakan variabel bebas PMA, ULN, dan ekspor, Suhendra & Irawati (2016) menggunakan variabel bebas tabungan, pengeluaran pemerintah, dan investasi, dan Fatmawati (2015) dengan menggunakan variabel bebas ekspor, impor, dan ULN.

Selain menggunakan dua pendekatan di atas, ada juga peneliti yang telah mengkaji dengan menggunakan pengembangan daripada *grand theory* pendapatan tersebut seperti Nasir (2019) menggunakan variabel bebas PAD dan Oktafia *et al.* (2018) telah meneliti variabel bebas PAD, DAU, dan DAK.

Publikasi penelitian terkait PDB banyak juga yang menggabungkan antara pendekatan produksi dengan pendekatan pengeluaran seperti Pardede *et al.* (2023) menggunakan variabel bebas investasi, inflasi, konsumsi, produksi, ekspor, impor, suku bunga, dan infrastruktur, Widiyanto & Arianti (2022) menggunakan variabel bebas investasi, jumlah penduduk, dan inflasi, Rofiq (2020) telah meneliti pengaruh variabel bebas pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja, Panelewen *et al.* (2020) telah melihat peran variabel bebas PMDN dan tenaga kerja, Patanduk *et al.* (2019) juga telah menggunakan variabel bebas investasi, tenaga kerja, dan belanja pemerintah, Larasati & Sulasmiyati (2018) telah memberi fokus pada variabel bebas inflasi, ekspor, dan tenaga kerja, Mohamat (2018) menggunakan variabel pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja dan Bonokeling (2016) menggunakan variabel bebas ULN, tenaga kerja, dan ekspor. Di sisi lain bahkan banyak juga

publikasi yang menggabungkan tiga pendekatan sekaligus seperti Wulantari *et al.* (2021) menggunakan variabel bebas PAD, DAU, dan PMDN dan Kristina (2017) menggunakan variabel bebas PAD, IPM, dan tenaga kerja.

Penelitian sebelumnya ada juga yang telah mengkaji PDB sektor pertanian seperti Sari & Juliansyah (2024) menggunakan variabel bebas luas lahan dan tenaga kerja pertanian, Himari *et al.* (2024) menggunakan variabel bebas tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian, Juliansyah & Setyowati (2023) menggunakan variabel bebas luas panen, produksi padi, dan tenaga kerja pertanian, Reavindo (2020) telah mengkaji variabel bebas luas lahan sawah dan tenaga kerja pertanian dan Safira *et al.* (2018) memberi fokus pada variabel bebas PMA, PMDN, tenaga kerja, dan luas lahan.

Penelitian sebelumnya terkait dengan PDB sektor perkebunan sudah diteliti oleh Haryati & Sa'roni (2023) menggunakan variabel bebas produksi karet, luas areal, dan harga, Maliani *et al.* (2023) menggunakan variabel bebas produksi kelapa sawit dan luas areal perkebunan kelapa sawit, dan Mujiburrahmad *et al.* (2019) menggunakan variabel bebas luas lahan, tenaga kerja, dan jumlah produksi tebu.

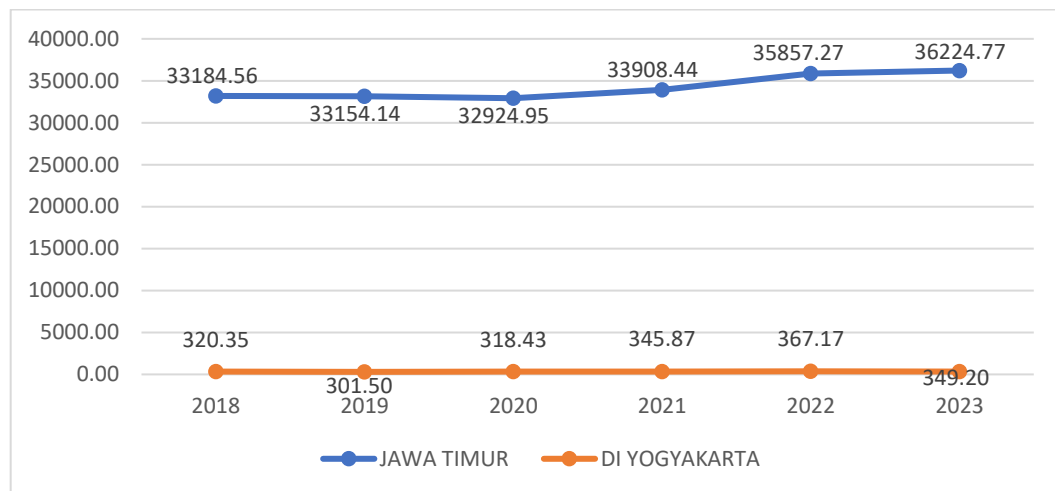
Pengkajian PDB sektor industri telah ditulis oleh Harun & Sari (2021) menggunakan variabel bebas PMA. Ada juga penelitian terkait dengan PDB sektor perikanan yang telah dikaji oleh Sulistijowati *et al.* (2023) menggunakan variabel bebas produksi ikan, ekspor neto, rantai nilai global, investasi perikanan, dan keterbukaan perdagangan.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji pengaruh tenaga kerja dan investasi terhadap PDB atau PDRB, sebagian besar studi terdahulu masih

memberikan fokus pada sektor ekonomi secara umum atau sektor-sektor dominan seperti sektor pertanian dan perkebunan. Penggunaan variabel investasi perikanan juga telah dikaji oleh Sulistijowati *et al.* (2023), akan tetapi variabel jumlah nelayan belum menjadi fokus kajian. Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya memberikan pengembangan fokus kajian dengan memasukkan variabel jumlah nelayan sebagai representasi tenaga kerja langsung di sektor perikanan, di samping investasi di sektor perikanan.

PDRB sektor perikanan Indonesia penting untuk dikaji karena memiliki peran strategis sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah (Mardyani & Yulianti, 2020). Sektor ini sangat bergantung pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sehingga mampu memberikan kontribusi berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi. Selain itu, sektor perikanan juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, mulai dari kegiatan penangkapan, budidaya, hingga pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. Dengan demikian, keberadaan sektor perikanan menjadi penompang penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, yang tercermin dari bertambahnya pendapatan dan terjaganya keberlanjutan ekonomi daerah.

Perkembangan PDRB perikanan di Indonesia akan ditunjukkan pada gambar di bawah ini, menampilkan provinsi yang memiliki PDRB perikanan tertinggi di Indonesia yaitu provinsi Jawa Timur dan provinsi yang memiliki PDRB perikanan terendah di Indonesia yaitu provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2018-2023.



Gambar 1.1 PDRB Sektor Perikanan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2018-2023 (Milliar Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi DI Yogyakarta (2025)

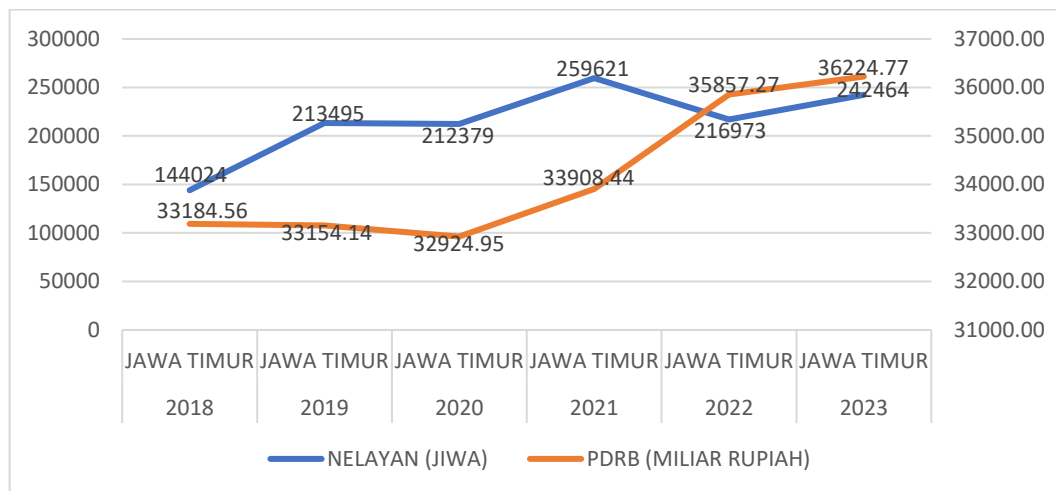
Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, PDRB perikanan provinsi Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi dengan nilai awal sebesar Rp33.184,56 miliar. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019-2020, yaitu masing-masing menjadi Rp33.154,14 miliar dan Rp32.924,95 miliar. Peningkatan ini terus berlanjut hingga mencapai Rp36.224,77 miliar pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor perikanan Jawa Timur memiliki kontribusi signifikan dan terus mengalami pemulihan, sehingga menunjukkan pertumbuhan yang positif setelah melewati periode penurunan.

Sementara itu, PDRB perikanan provinsi DI Yogyakarta cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan Jawa Timur. Pada tahun 2019 sektor perikanan di Yogyakarta mengalami penurunan menjadi Rp301,50 miliar dari tahun sebelumnya. Namun, sejak tahun 2020 sektor ini terus menunjukkan peningkatan, hingga pada tahun 2022 menjadi Rp367,17 miliar. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi Rp349,20

miliar. Perkembangan ini mencerminkan bahwa sektor perikanan di Yogyakarta cenderung berfluktuasi, dengan pertumbuhan positif yang belum sepenuhnya stabil.

Dalam fungsi produksi, tenaga kerja merupakan input penting yang secara langsung mempengaruhi hasil produksi dalam suatu kegiatan ekonomi. Pada sektor perikanan, tenaga kerja yang dimaksud adalah nelayan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016, nelayan didefinisikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan perikanan tangkap terbagi menjadi nelayan laut dan nelayan perairan umum daratan (Kementrian Kelautan dan Perikanan). Dalam penelitian ini jumlah nelayan yang dimaksud adalah nelayan yang wilayah penangkapannya terletak di daerah perairan laut yang alami, bukan perairan budidaya yang dikelola secara intensif.

Berikut perkembangan jumlah nelayan dan PDRB perikanan provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023.

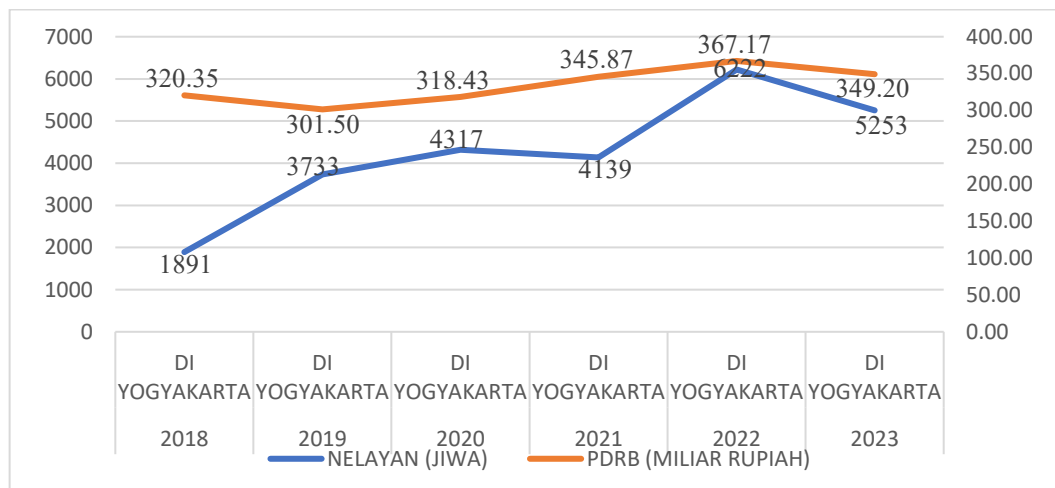


Gambar 1.2 Jumlah Nelayan dan PDRB Perikanan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023

Sumber : Publikasi Statistik KKP, dan BPS Provinsi Jawa Timur (2025)

Berdasarkan Gambar 1.2 jumlah nelayan dan PDRB perikanan provinsi Jawa Timur terus mengalami fluktuasi selama 6 tahun. Terjadi fenomena pada tahun 2019, dimana jumlah nelayan mengalami peningkatan sebesar 48,19% menjadi 213.495 jiwa, tetapi PDRB subsektor perikanan mengalami penurunan sebesar 0,09% menjadi Rp33.154,14 miliar dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2022 jumlah nelayan mengalami penurunan sebesar 16,41% menjadi 216.973 jiwa, akan tetapi PDRB subsektor perikanan mengalami peningkatan sebesar 5,74% menjadi Rp35.857,27 miliar dari tahun sebelumnya.

Berikut perkembangan jumlah nelayan dan PDRB perikanan provinsi DI Yogyakarta tahun 2018-2023.



Gambar 1.3 Jumlah Nelayan dan PDRB Perikanan di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2018-2023

Sumber : Publikasi Statistik KKP, dan BPS Provinsi DI Yogyakarta (2025)

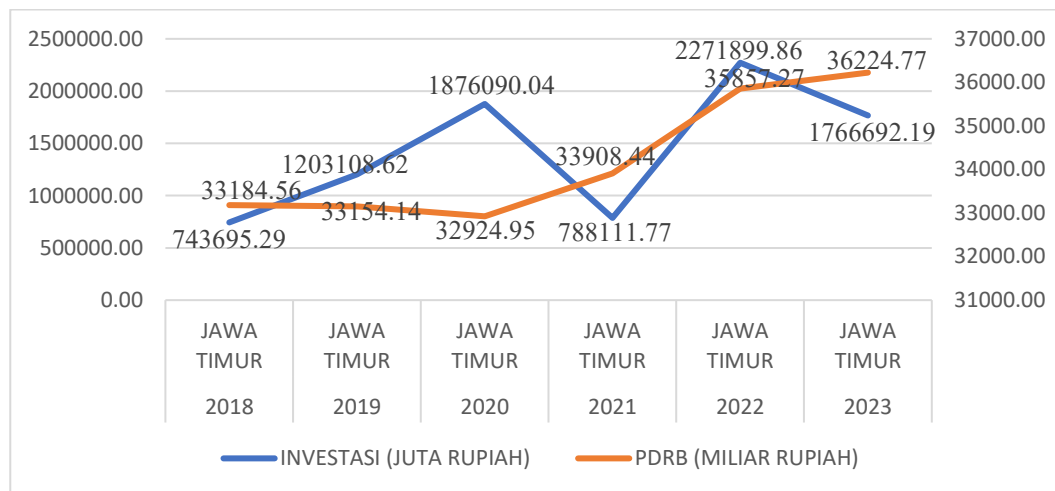
Berdasarkan Gambar 1.3 jumlah nelayan dan PDRB perikanan provinsi DI Yogyakarta terus menunjukkan tren yang berfluktuasi selama 6 tahun. Terjadi fenomena pada tahun 2019 dimana jumlah nelayan meningkat drastis menjadi 3.733 jiwa, tetapi PDRB subsektor perikanan mengalami penurunan sebesar 5,9% menjadi Rp301,50 miliar dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2021 jumlah nelayan mengalami penurunan menjadi 4.139 jiwa, akan tetapi PDRB

subsektor perikanan mengalami peningkatan sebesar 8,6% menjadi Rp345,87 miliar dari tahun sebelumnya.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan jumlah nelayan tidak selalu sejalan dengan peningkatan PDRB perikanan. Peningkatan jumlah nelayan tanpa diikuti dengan peningkatan produktivitas, efisiensi alat tangkap, teknologi, dan dukungan modal akan membuat kontribusinya terhadap PDRB perikanan menjadi terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan PDRB perikanan tidak hanya bergantung pada jumlah nelayan, tetapi juga pada faktor lain seperti peningkatan investasi, penerapan teknologi, dan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan.

Selain tenaga kerja, investasi juga berperan penting dalam meningkatkan output produksi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap PDRB sektor perikanan. Secara sederhana, investasi berarti penanaman modal yang digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Terdapat dua tujuan utama dari investasi, yaitu mengganti barang modal yang mengalami kerusakan dan menambah ketersediaan barang modal yang sudah ada (Mauliansyah & Mard, 2017). Dengan adanya tambahan modal, sektor perikanan diharapkan dapat memiliki peralatan yang modern, kapal yang lebih baik atau sarana pengolahan hasil perikanan yang lebih memadai. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas nelayan, memperbesar nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Berikut perkembangan investasi dan PDRB perikanan provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023.

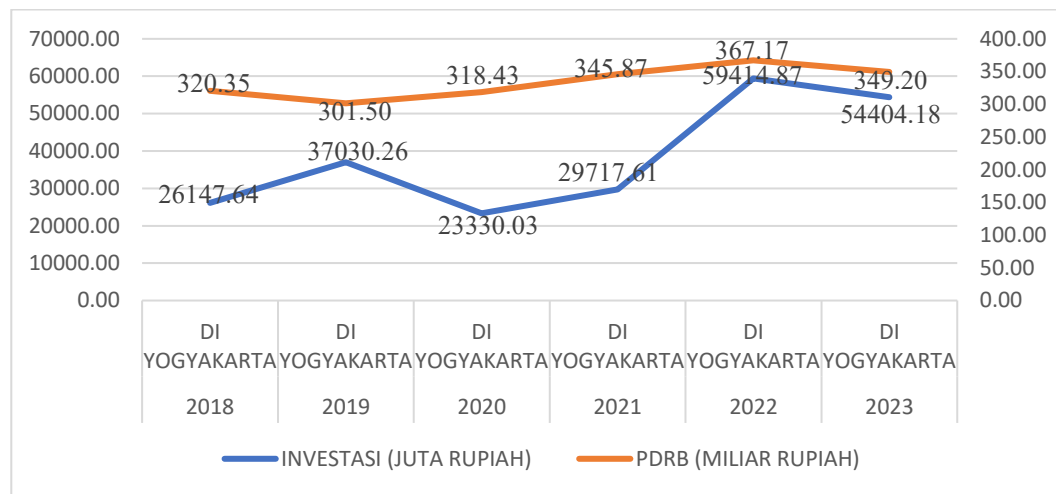


Gambar 1.4 Investasi Perikanan dan PDRB Perikanan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023

Sumber : Publikasi Statistik KKP, dan BPS Provinsi Jawa Timur (2025)

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas, investasi dan PDRB perikanan provinsi Jawa Timur terus mengalami fluktuasi selama 6 tahun. Pada tahun 2019 dan 2020 investasi perikanan mengalami peningkatan yang sangat tajam masing-masing sebesar 61,5% dan 55,9%, tetapi PDRB perikanan mengalami penurunan masing-masing menjadi Rp33.154,14 miliar dan Rp32.924,95 miliar dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 57,9%, akan tetapi PDRB perikanan mengalami peningkatan sebesar 8,6% dari tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2023, dimana investasi perikanan mengalami penurunan sebesar 22,4%, akan tetapi PDRB perikanan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi Rp36.224,77 miliar.

Berikut perkembangan investasi dan PDRB perikanan provinsi DI Yogyakarta tahun 2018-2023.



Gambar 1.5 Investasi Perikanan dan PDRB Perikanan di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2018-2023

Sumber : Publikasi Statistik KKP, dan BPS Provinsi DI Yogyakarta (2025)

Berdasarkan Gambar 1.5 di atas, investasi perikanan dan PDRB perikanan di DI Yogyakarta terus mengalami fluktuasi selama 6 tahun. Pada tahun 2019 investasi perikanan mengalami peningkatan sebesar 41,6% menjadi Rp37.030,26 juta, akan tetapi PDRB perikanan mengalami penurunan sebesar 5,9% menjadi Rp301,50 miliar dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020 investasi perikanan mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 36,9% menjadi Rp23.330,03 juta, akan tetapi PDRB perikanan mengalami peningkatan sebesar 5,6% menjadi Rp318,43% dari tahun sebelumnya.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan PDRB sektor perikanan, meskipun pengaruhnya tidak selalu langsung terlihat pada tahun yang sama. Oleh karena itu, investasi yang konsisten dapat menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena yang terjadi di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Jumlah Nelayan dan Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Perikanan di Indonesia”**, dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. Data *time series* selama 6 tahun dari tahun 2018-2023 dan data *cross section* sebanyak 34 provinsi di Indonesia, yang menghasilkan sebanyak 204 observasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah nelayan terhadap produk domestik regional bruto perikanan di 34 provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap produk domestik regional bruto perikanan di 34 provinsi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh jumlah nelayan dan investasi terhadap produk domestik regional bruto perikanan di 34 provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah nelayan terhadap produk domestik regional bruto di 34 provinsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi terhadap produk domestik regional bruto di 34 provinsi di Indonesia.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah nelayan dan investasi terhadap produk domestik regional bruto di 34 provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah manfaat atau masukan mengenai perkembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu ekonomi pertanian untuk mengetahui bagaimana strategi yang diharapkan dalam perekonomian serta bagaimana penerapannya.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan produk domestik regional bruto perikanan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat teoritis yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Indonesia: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan Indonesia dalam pengambilan kebijakan tentang produk domestik regional bruto di Indonesia melalui jumlah nelayan dan investasi.

2. Bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dikembangkan lebih lanjut lagi serta menjadi referensi penelitian yang serupa.